

FACTSHEET

REFLEKSI TATA KELOLA & KINERJA KEUANGAN DAERAH SE-RIAU TAHUN 2021

Catatan Akhir Tahun - FITRA RIAU 2021

PENULIS
Tarmidzi



DESEMBER 2021

PENGANTAR

Local Budget Analysis (LBA) merupakan pendekatan analisis kebijakan anggaran untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah dari aspek kepatuhan atas regulasi, efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran, serta keberpihakan anggaran untuk kepentingan publik, seperti; penanganan covid dan program pemulihan ekonomi (PEN) di daerah, dan tidak terbatas pada itu, juga melihat keberpihakan anggaran diberbagai sektor termasuk sektor pendidikan, lingkungan hidup dan alokasi belanja fungsi lainnya, untuk itu melalui studi LBA ini dapat memberkian rekomendasi yang mendasar terkait dengan isu-isu strategis daerah.

Kesehatan fiskal daerah menjadi ukuran penting untuk melihat pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel untuk mendukung capaian kinerja. Daerah dengan peringkat kesehatan fiskal yang baik, maka akan semakin baik pula dalam menentukan arah kebijakan pembangunan kedepan. Prinsip dasar peneringkatan Kesehatan Fiskal daerah untuk menghubungkan dengan capaian pelayanan dasar publik di daerah dalam mendukung pencapaian peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan. Selain itu, kesehatan fiskal juga menjadi indikator pemerintah dalam pemberian insentif terhadap pemerintah daerah yang berhasil meningkatkan kinerja anggaran.

Secara umum, kondisi keuangan daerah Provinsi Riau dan 12 Kabupaten/Kota se- Riau dalam tiga tahun terakhir (2019-2021) terus mengalami kenaikan, dengan demikian semakin tinggi pendapatan daerah maka semakin besar pula kesempatan pemerintah daerah dapat membiayai program prioritas daerah. Disamping itu pula, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel dalam memastikan tujuan pembangunan daerah dapat tercapai. Penilaian kesehatan fiskal dilakukan terhadap pemerintah Provinsi Riau dan 12 kabupaten/kota tahun 2019-2020, dengan pendekatan Local Budget Analisis (LBA) sebagaimana yang dilakukan setiap tahunnya.

RUANG LINGKUP;

EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH



KESEHATAN FISKAL DAERAH TAHUN 2019-2020

1. Indikator Kesehatan Fiskal; Pendapatan Perkapita, Kemandirian Keuangan daerah, Rasio Ruang Fiskal, Pertumbuhan Pajak dan Retribusi daerah, Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Rasio Belanja Modal, Rasio Belanja Pegawai, Kondisi Silpa daerah.
2. Kesehatan Fiskal yang diukur yaitu berdasarkan Realisasi anggaran tahun 2019 dan 2020, untuk membandingkan ketahanan keuangan daerah sebelum pandemi dan masa pandemi



KINERJA KEUANGAN DAERAH & KETAHANAN MASA PANDEMI TAHUN 2021

1. Analisis ini menggambarkan kondisi kinerja keuangan daerah setelah pandemi terkait program prioritas pembangunan daerah di Provinsi Riau 12 Kabupaten/Kota



KESEHATAN FISKAL DAERAH TAHUN 2019-2020

INDIKATOR KESEHATAN FISKAL

Kategori Penilaian Semakin Tinggi semakin Baik;

- Pendapatan Perkapita Daerah
- Kemandirian Keuangan Daerah
- Rasio Ruang Fiskal
- Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD),
- Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
- Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah

Kategori Penilaian Semakin Rendah semakin Baik;

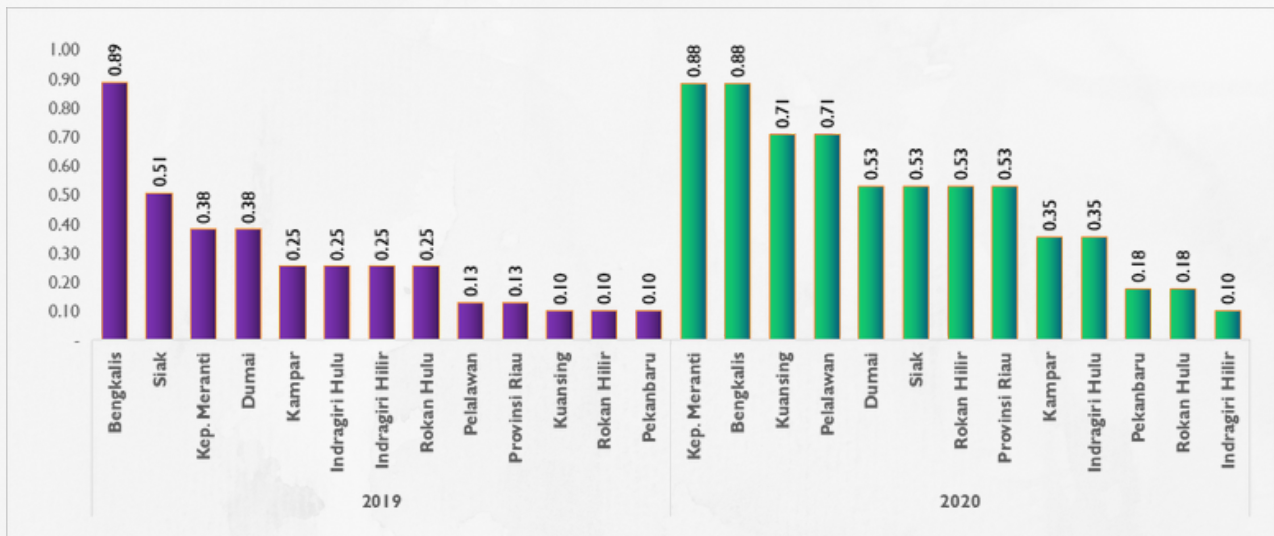
- Rasio Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah
- Kondisi Silpa daerah.

METODE PENILAIAN = INDEKS

Kategori Penilaian Semakin Tinggi semakin Baik;	Kategori Penilaian Semakin Rendah semakin Baik;
75-100=4	75-100=1
50-75=3	50-75=2
25-50=2	25-50=3
0-25=1	0-25=4

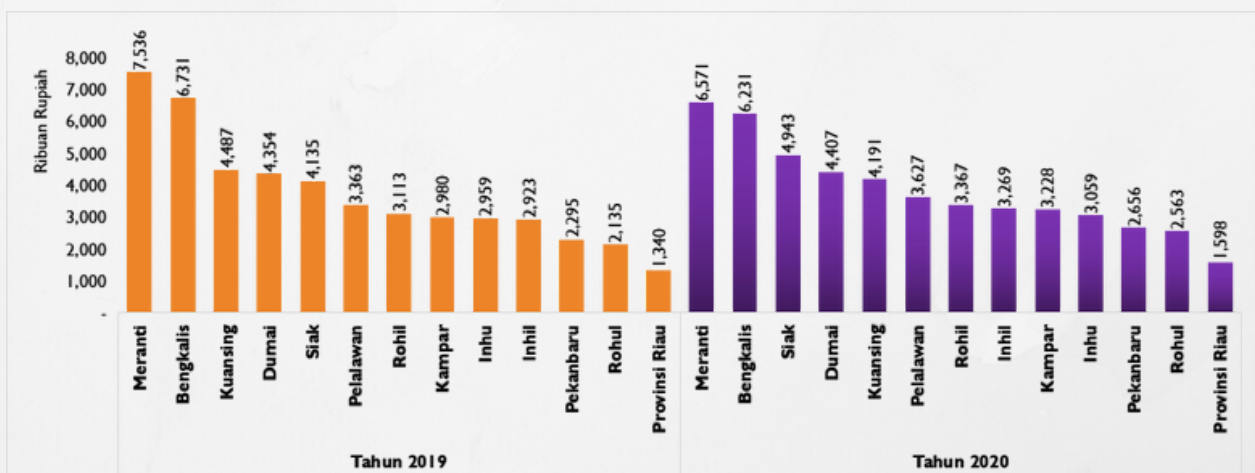
Nilai Indeks	Penilaian
0,1 - 0,25	Kurang Sehat
0,25 - 0,50	Cukup Sehat
0,50 - 0,75	Sehat
0,75 - 100	Sangat Sehat

PERINGKAT KESEHATAN FISKAL DAERAH TAHUN 2019-2020



Hasil pemeringkatan kesehatan fiskal daerah se-Riau tahun 2019-2020, Daerah dengan kategori keuangan yang sangat baik/sehat adalah Kabupaten Bengkalis dengan scor indeks 0,88-0,89. Kab. Meranti pada tahun 2019 hanya berada pada peringkat cukup 0,38, kemudian di tahun 2020 naik menjadi sangat baik/sehat dengan indeks 0,88. Daerah lainnya yang terdapat peningkatan dari tahun 2019-2020, yaitu Kuansing, Pelalawan, Dumai, Siak, Rohil dan Prov. Riau naik pada peringkat baik/sehat dengan scor indeks antara 0,53 - 0,71. Kemudian Kab. Kampar dan Inhil meningkat dalam kategori cukup sehat dengan scor indeks 0,35, dan Pekanbaru meningkat namun tetap dalam kategori tidak baik/sehat. Terdapat dua daerah yang menurun kesehatan fiskalnya dari 2019-2020 yaitu; Rokan Hulu dan Inhil dalam kategori tidak sehat/baik.

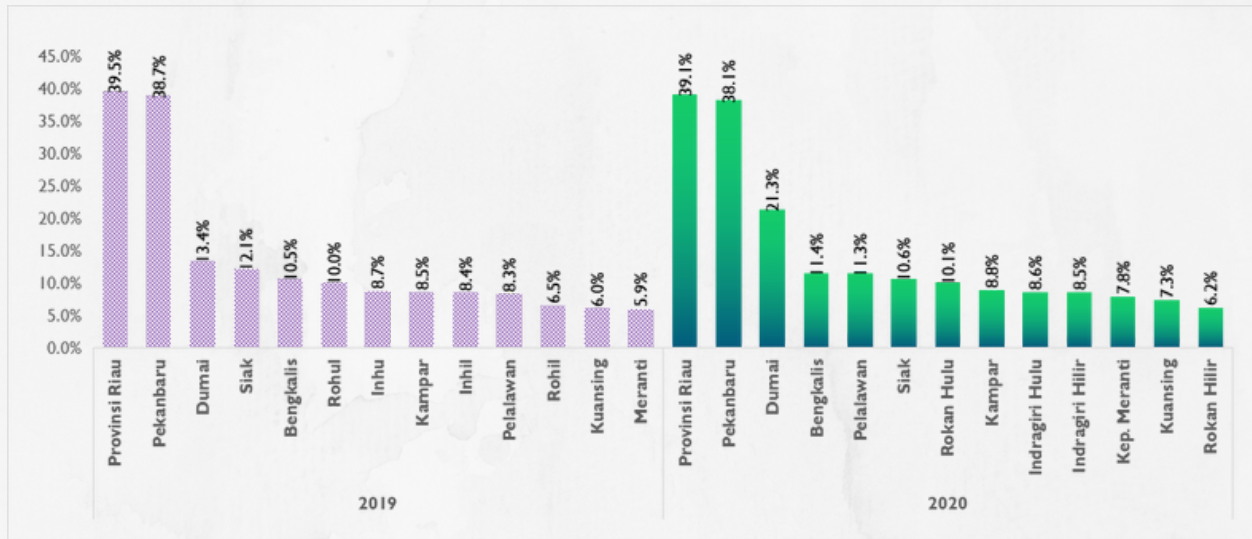
1. PERKEMBANGAN PENDAPATAN PERKAPITA TAHUN 2019-2020



Daerah dengan pendapatan perkapita terbesar secara berturut-turut dalam dua tahun (2019-2021) yaitu Kab. Meranti dan Bengkalis antara Rp6 juta – Rp7,5 juta. Daerah pendapatan perkapita terendah yaitu kab. Rohul dan Pekanbaru antara 2,5 juta- Rp2,6 juta.

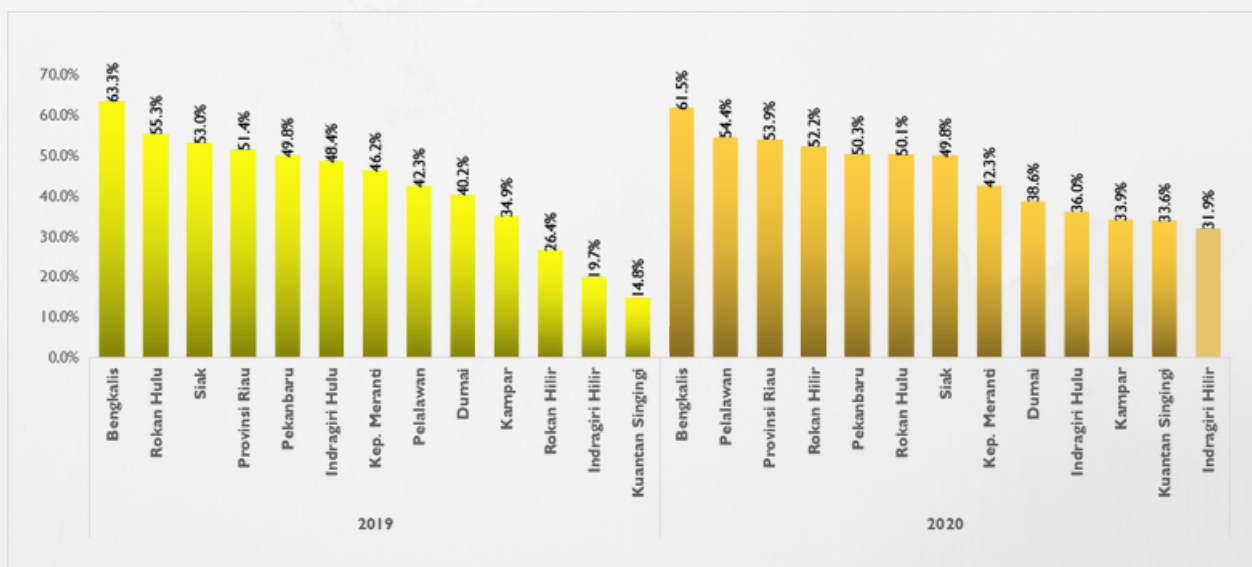
Rata-rata pendapatan perkapita di tingkat provinsi dalam dua tahun terdapat peningkatan dari Rp1,3 juta naik menjadi Rp1,59 juta pada tahun 2020. Daerah lainnya dengan pendapatan perkapita antara Rp3 juta – 4,9 juta.

2. KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2019-2020



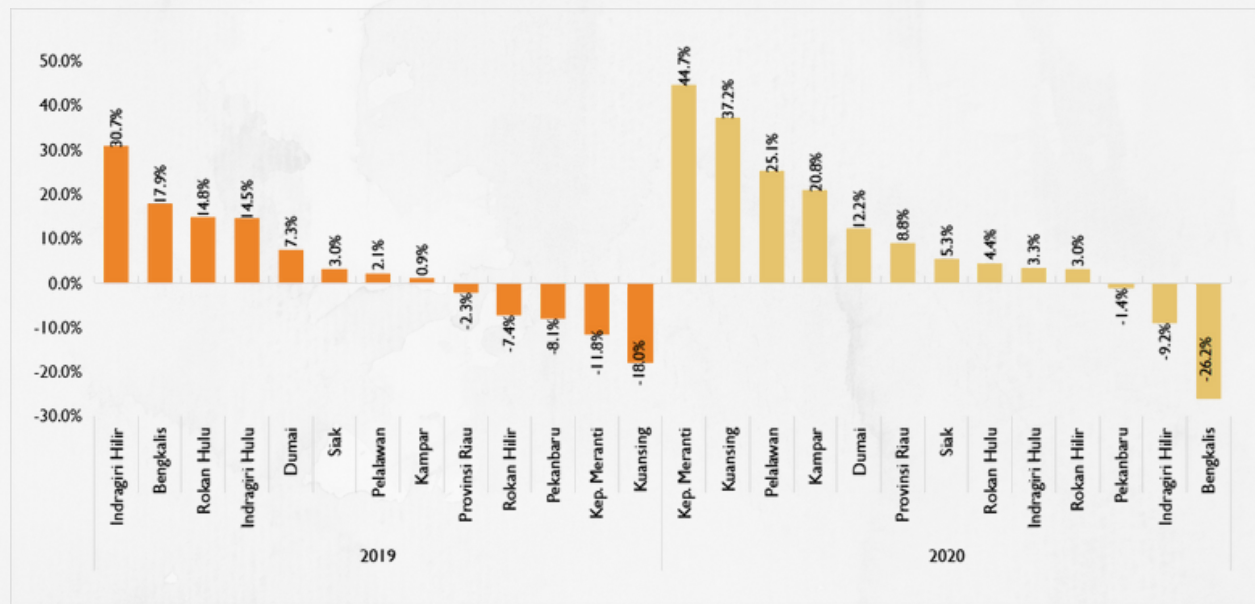
Tingkat kemandirian keuangan daerah dari tahun 2019-2020, daerah dengan peringkat tertinggi yaitu Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru namun masih pada kategori cukup dengan skor indeks antara 38%-39%, sedangkan daerah lainnya berada pada peringkat tidak sehat dengan skor indeks antara 6%-21%. Bagi daerah yang masih rendah tingkat kemandirian keuangannya akan semakin sulit untuk membiayai program prioritas daerah, karena ketergantungan terhadap pendapatan transfer (bagi hasil) dari pusat.

3. RASIO RUANG FISKAL TAHUN 2019-2020



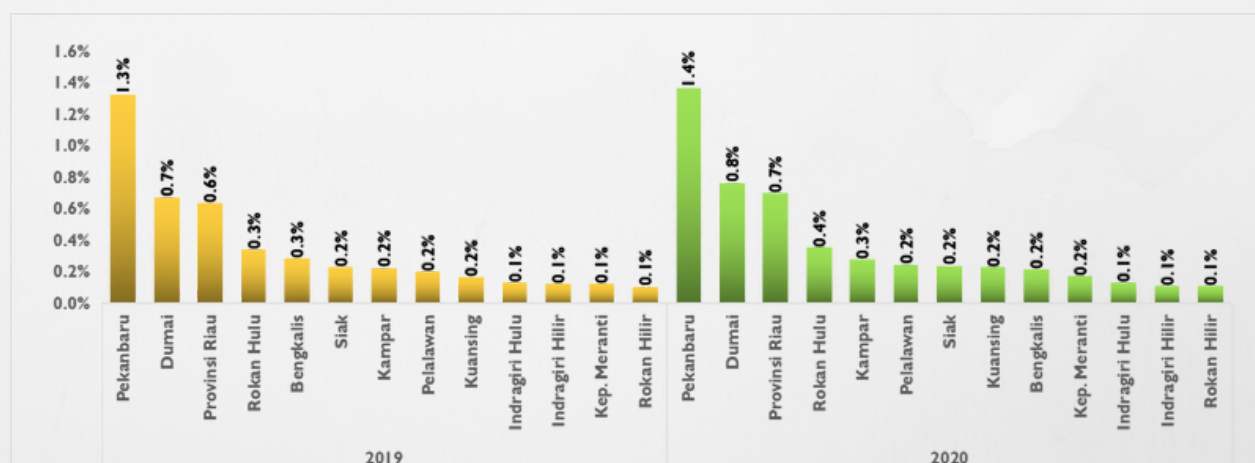
Rasio ruang fiskal tertinggi dalam dua tahun (2019-2020), secara berturut-turut terdapat di Kab. Bengkalis dengan kategori sehat/baik dengan skor diatas 60%, dan daerah lainnya termasuk provinsi Riau dengan skor dibawah 50%-54%. Sedangkan daerah lainnya pada tahun 2020 berada pada peringkat cukup sehat antara 31%-42% yaitu Kab. Meranti, Dumai, Inhu, Kampar, Kuansing dan Inhil.

4. PERTUMBUHAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



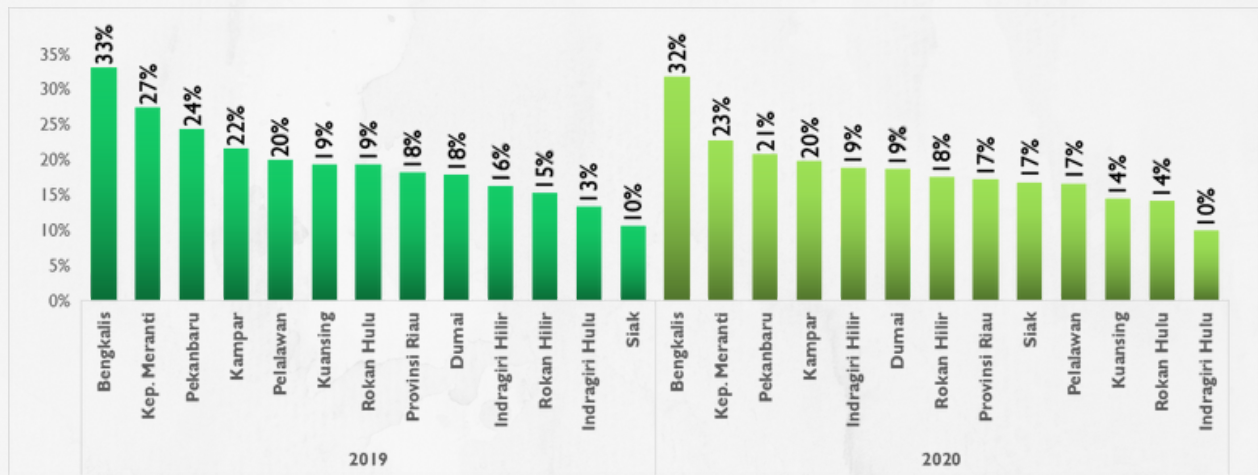
Daerah dengan tingkat pertumbuhan pajak dan retribusi tertinggi pada tahun 2020 yaitu Kab. Meranti dengan skor 44% sebelumnya pada tahun 2019 justru minus. Selain itu daerah dengan pertumbuhan yang positif dengan skor antara 3%-37%. Sedangkan Kota Pekanbaru, Inhil dan Bengkalis pada tahun 2020 terdapat pertumbuhan yang negative/minus antara -1,4% sampai -26%

5. RASIO PAJAK DAN RETRIBUSI TERHADAP PDRB DI DAERAH



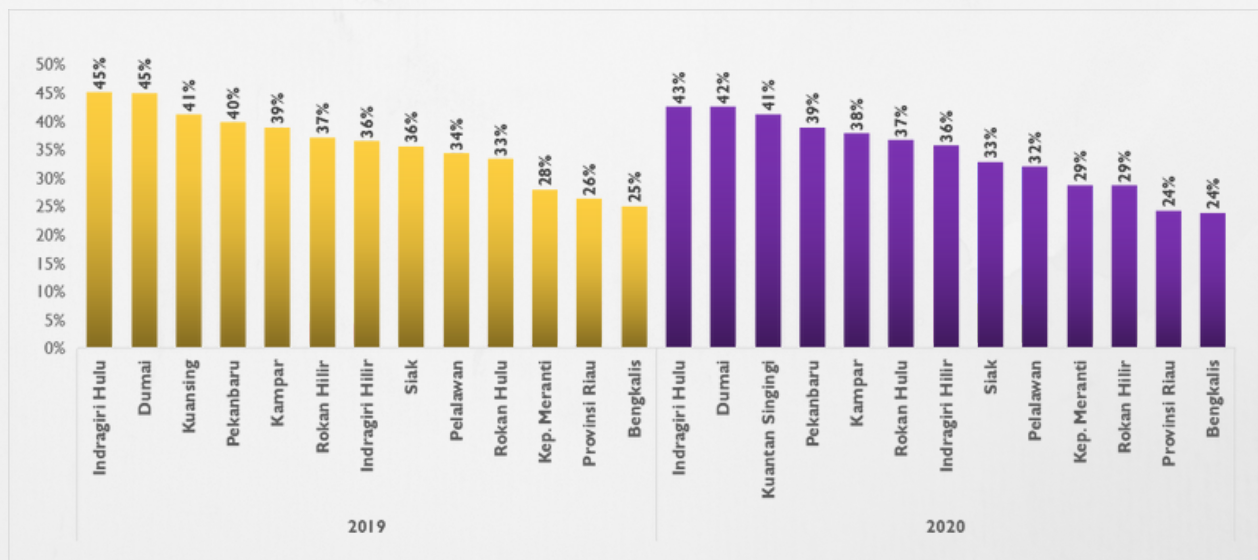
Rasio Pajak dan Retribusi terhadap PDRB di daerah se Riau masih sangat rendah dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2020 daerah dengan skor tertinggi hanya Kota Pekanbaru sebesar 1,4%. Sedangkan daerah lainnya termasuk Provinsi Riau dengan rasio di bawah angka 1%.

6. RASIO BELANJA MODAL TERHADAP BELANJA DAERAH



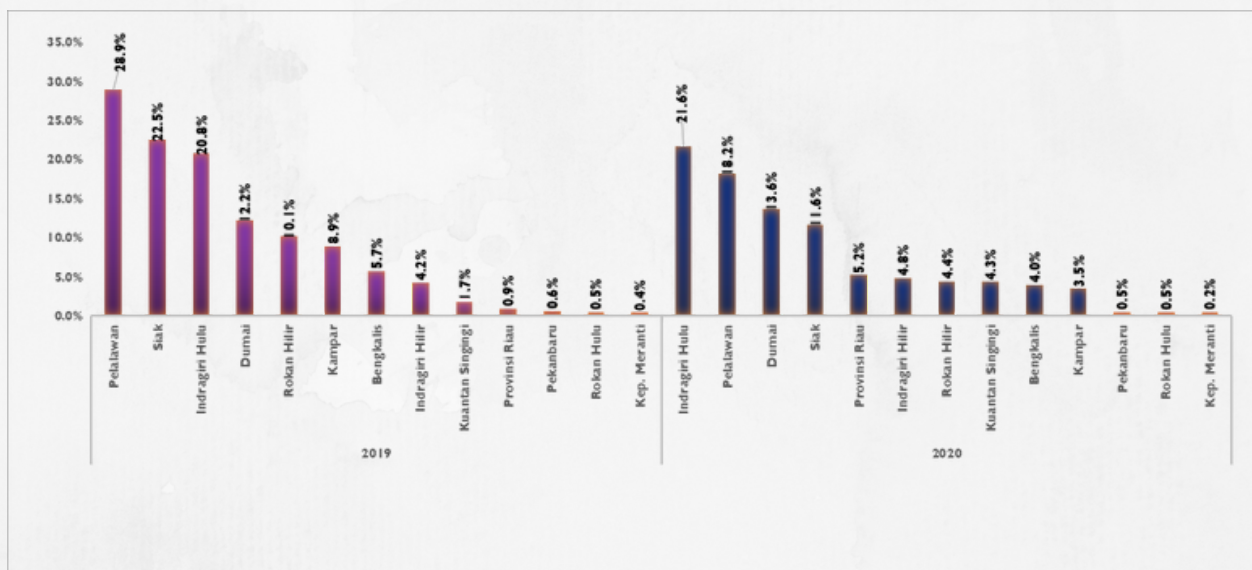
Belanja modal merupakan belanja yang sebagian besar digunakan untuk memenuhi kepentingan publik, semakin besar alokasi belanja modal suatu daerah maka akan semakin baik. Dalam dua tahun terakhir (2019-2020) Daerah dengan rasio belanja modal tertinggi yaitu Kab. Bengkalis dengan rasio antara 32% dan 33%. Daerah lainnya termasuk Provinsi Riau dengan skor dibawah 30%, daerah terendah hanya dengan rasio 10%, pada tahun 2020 yaitu Kab. Inhil dan pada tahun 2019 yaitu Kab. Siak.

7. RASIO BELANJA PEGAWAI TERHADAP BELANJA DAERAH



Rasio Belanja Pegawai daerah se-Riau termasuk provinsi, pada tahun 2019-2020 masih berada dibawah angka 50%. Belanja Pegawai diukur berdasarkan rasio terendah, semakin rendah belanja pegawai yang dialokasikan maka semakin baik untuk mendukung belanja publik. Pada tahun 2020, daerah dengan rasio terendah atau paling sehat dengan skor dibawah 25% yaitu Kab. Bengkalis dan Provinsi Riau. daerah lainnya dengan rasion antara 29%-39%. Daerah paling tinggi/kurang baik dengan rasio belanja pegawai diatas angka 40% yaitu Ka. Kuansing, Dumai dan Inhu.

8. KONDISI SILPA TERHADAP BELANJA DAERAH



SILPA merupakan sisa anggaran setiap tahunnya, semakin besar sisa anggaran menunjukkan daerah tidak mampu mengelola belanja daerah sesuai rencana yang telah ditetapkan akibatnya banyak anggaran yang tidak terserap dengan baik. Disamping itu, pemerintah daerah perlu melakukan efisiensi anggaran yang berkonsekuensi adanya Silpa. Dalam hal efisiensi anggaran, proyeksi Silpa tidak lebih dari angka 5% disamping itu perlu diperhatikan adalah efektifitas penggunaan anggaran untuk membiayai sektor prioritas. Penilaian kesehatan fiskal menunjukkan semakin kecil sisa anggaran setiap tahunnya maka akan semakin baik pengelolaan anggarannya. Dalam dua tahun dari 2019-2020 daerah dengan peringkat silpa terendah atau paling balik yaitu Kab. Meranti, Rohul dan Pekanbaru. Pada tahun 2020 Daerah dengan silpa tertinggi mencapai 11%-21% yaitu Kab. Inhu, Pelalawan, Dumai dan Siak, daerah dengan silpa dibawah 5% yaitu Inhil, Rohil Kuansing, Kampar, dan Kampar. Sedangkan Provinsi Riau terdaapt silpa sebesar 5,2%.



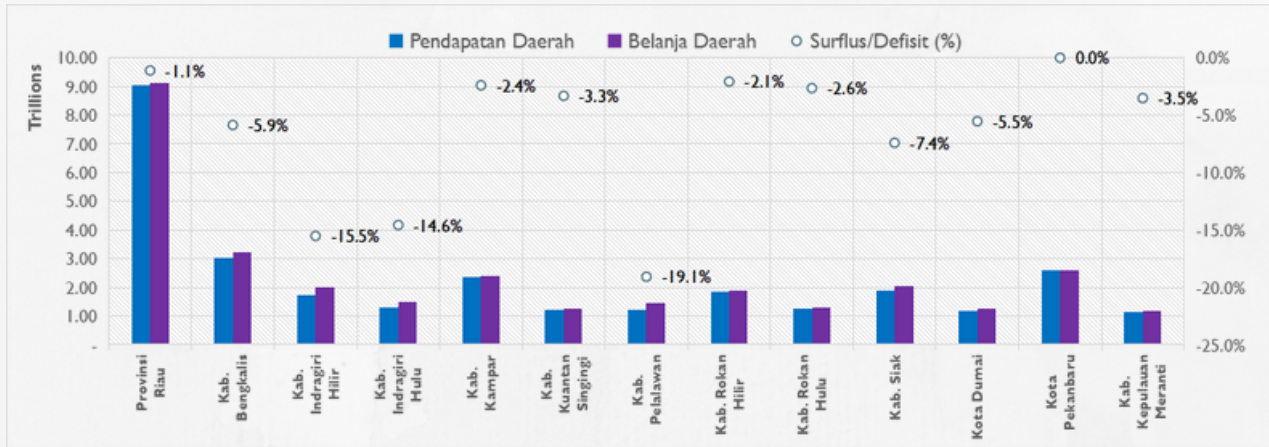
KINERJA KEUANGAN DAERAH & KETAHANAN MASA PANDEMI TAHUN 2021

1. KONDISI KINERJA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2021

2. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI RIAU 12 KABUPATEN/KOTA

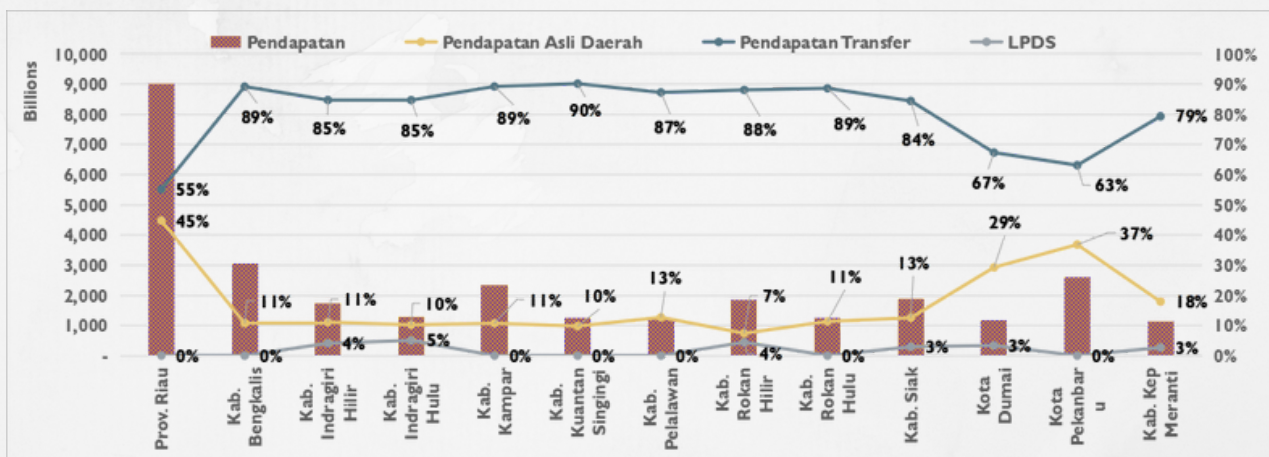
3. KEBIJAKAN ANGGARAN PENANGANAN COVID DAN PROGRAM PEN DAERAH

KINERJA KEUANGAN DAERAH SE-RIAU TAHUN 2021



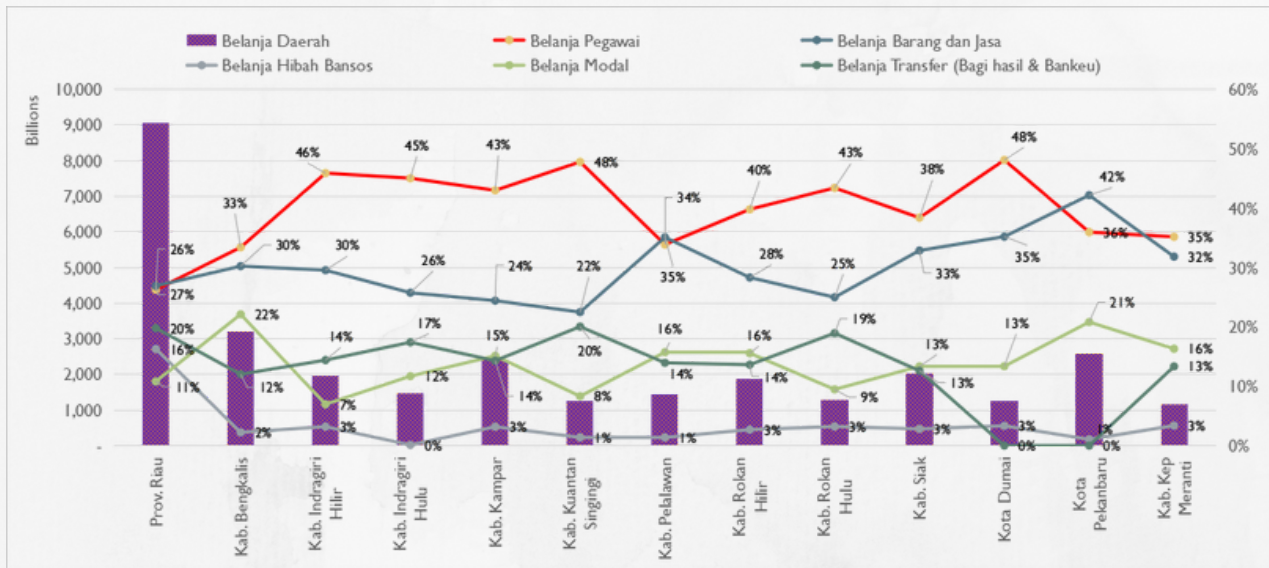
Pemerintah daerah se- Riau pada tahun 2021 rata-rata memproyeksikan belanja lebih tinggi dari proyeksi pendapatannya sehingga akan terdapat defisit anggaran. Daerah dengan defisit tertinggi yaitu kab. Pelalawan sebesar -19% dan Inhil sebesar -15%, Inhu -14%. Daerah lainnya dibawah angka -10%. Secara otomatis daerah yang terdapat defisit selalu mengandalkan pembiayaan yang bersumber dari silpa tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan daerah di Riau belum mampu untuk membiayai kebutuhan belanja masing-masing daerah

KONTRIBUSI PENDAPATAN DAERAH BERDASARKAN JENIS TAHUN 2021



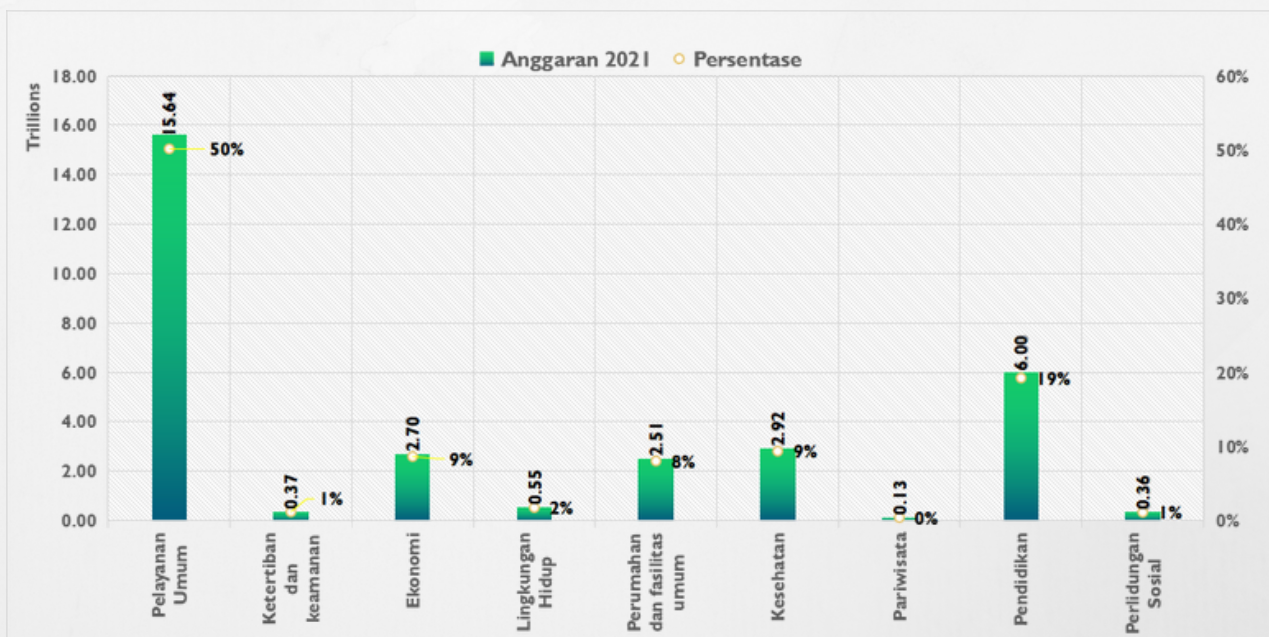
Kontribusi terbesar pendapatan daerah di Riau bersumber dari pendapatan transfer pusat ke daerah, di tingkat kabupaten/kota secara rerata mencapai 83%, dan Provinsi Riau sebesar 55%. Angka ini menunjukkan bahwa semakin besar ketergantungan terhadap dana perimbangan maka kemandirian daerah semakin rendah sehingga daerah tidak secara leluasa dapat membiayai program prioritas daerah, bahkan pendapatan transfer yang bersumber dari DAK sudah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah pusat.

PROPORSI BELANJA DAERAH TAHUN 2021



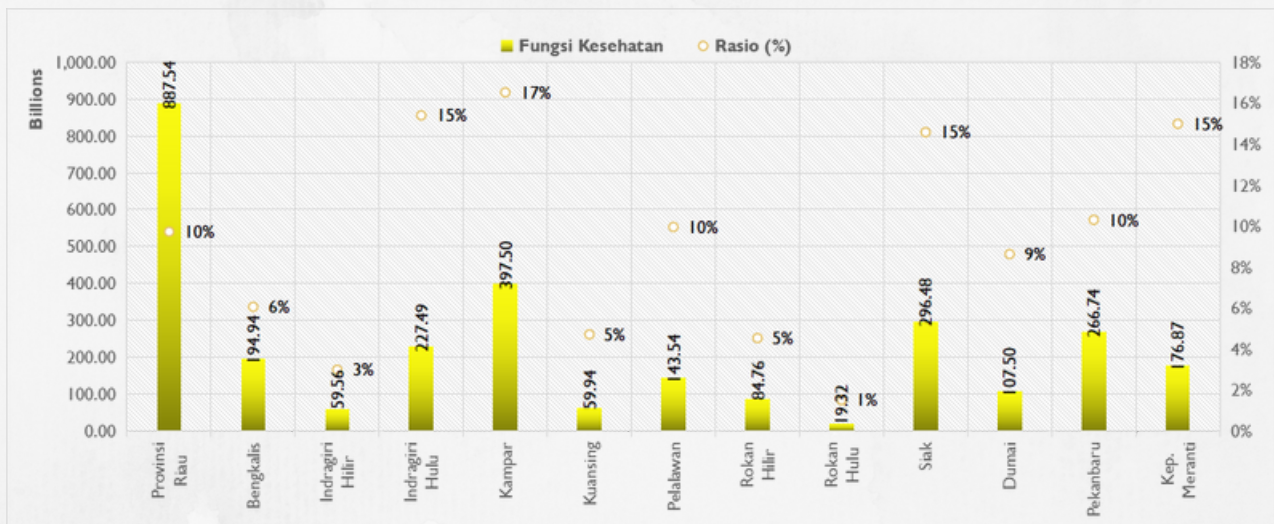
Proporsi Belanja Daerah terbesar digunakan untuk membiayai belanja gaji pegawai, rata-rata ditingkat Kabupaten/kota mencapai 41%, Kab. Kuansing dan Kota Dumai merupakan daerah tertinggi porsi belanja pegawai masing-masing mencapai 48% dan Kab. Inhil 46%, daerah lainnya dibawah angka 45%. Sedangkan Provinsi Riau dengan rasio belanja pegawai sebesar 26%. Dari angka tersebut, pemerintah daerah perlu mengkaji ulang terkait kekuatan anggaran daerah untuk membiayai belanja kepentingan publik yang cenderung masih rendah seperti belanja barangjasa dengan rerata hanya 30% dan belanja modal hanya sebesar 13% dari total belanja daerah.

BELANJA DAERAH BERDASARKAN FUNGSI TAHUN 2021 (TOTAL PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA)



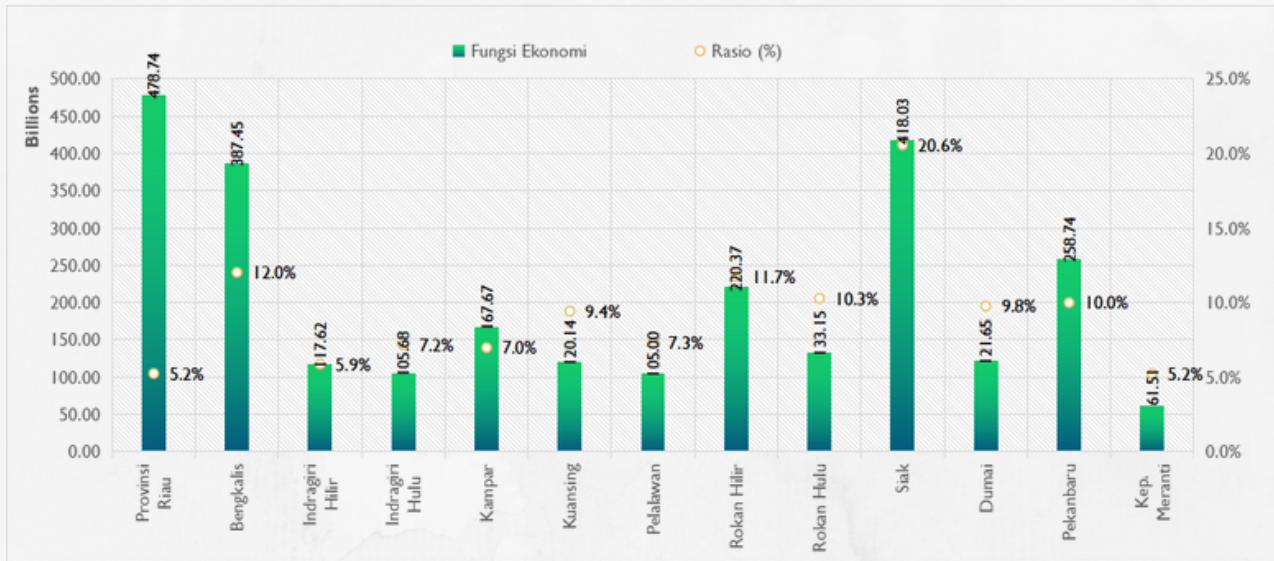
Proporsi Belanja Daerah terbesar digunakan untuk membiayai belanja gaji pegawai, rata-rata ditingkat Kabupaten/kota mencapai 41%, Kab. Kuansing dan Kota Dumai merupakan daerah tertinggi porsi belanja pegawai masing-masing mencapai 48% dan Kab. Inhil 46%, daerah lainnya dibawah angka 45%. Sedangkan Provinsi Riau dengan rasio belanja pegawai sebesar 26%. Dari angka tersebut, pemerintah daerah perlu mengkaji ulang terkait kekuatan anggaran daerah untuk membiayai belanja kepentingan publik yang cenderung masih rendah seperti belanja barangjasa dengan rerata hanya 30% dan belanja modal hanya sebesar 13% dari total belanja daerah.

BELANJA FUNGSI KESEHATAN - BERKAITAN DENGAN PENANGANAN COVID-19



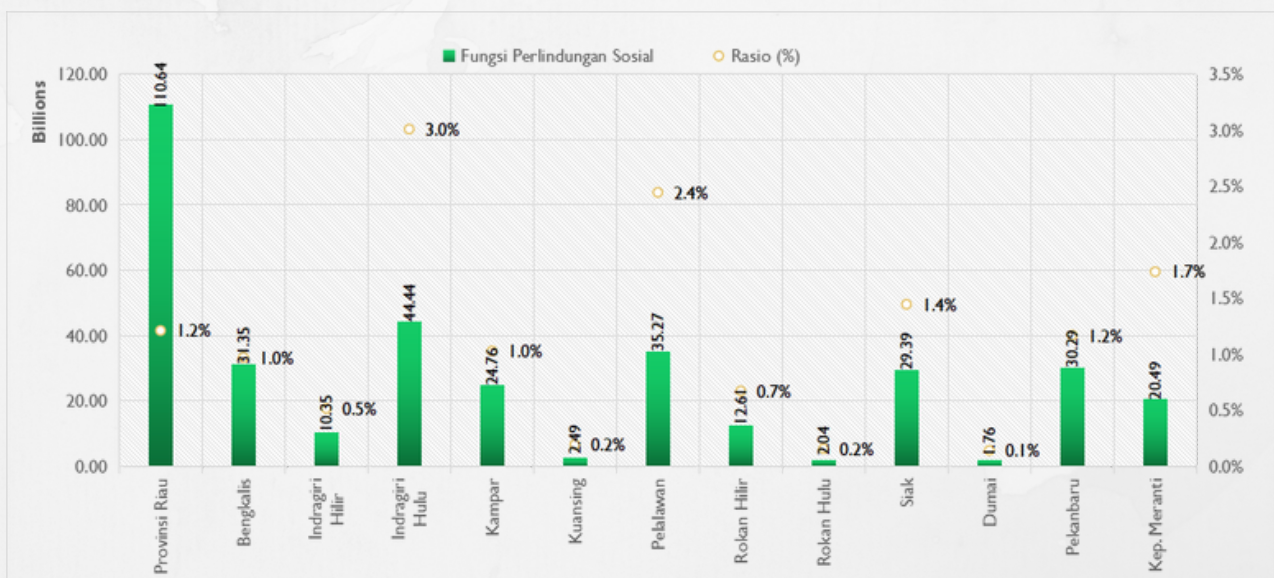
Belanja kesehatan sebagaimana dimandatkan UU minimal sebesar 10% dari total belanja daerah, bahkan dimasa pandemi daerah dapat memprioritaskan belanja untuk penanganan covid-19. Terdapat beberapa daerah di Riau justru alokasi belanja fungsi kesehatan dibawah angka 10% yaitu, Bengkalis, Inhil, Kuansing, Rohil, Rohul, dan Kota Dumai. Daerah tertinggi belanja kesehatan diatas angka 10% yaitu Kampar 17%, Inhu, Siak dan Meranti 15%, Provinsi Riau, Pelalawan, dan Pekanbaru sebesar 10% dari total belanja daerah.

BELANJA FUNGSI EKONOMI – MENDUKUNG KETAHANAN EKONOMI DIMASA PANDEMI COVID-19



Belanja fungsi ekonomi mendukung upaya pemulihan ekonomi dimasa pandemi, daerah tertinggi yaitu kab. Siak mencapai 20,6%, selanjutnya Kab. Bengkalis 12,0%, Rohil 11,7%, daerah lainnya termasuk Provinsi Riau antara 10%-5%.

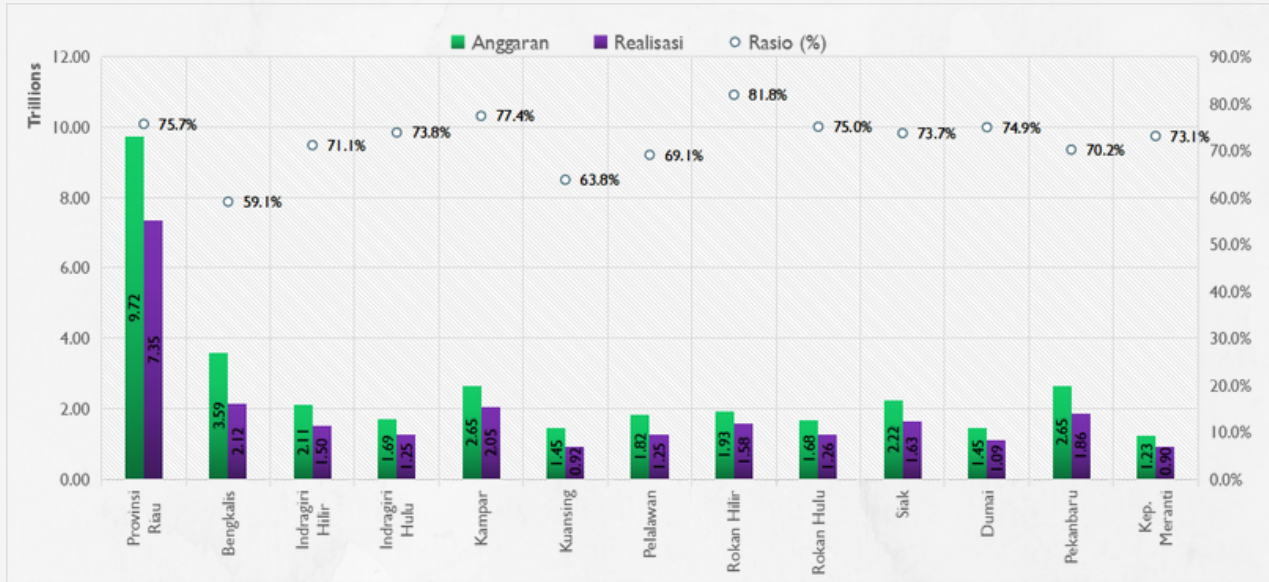
BELANJA FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL – PENANGANAN DAMPAK SOSIAL DIMASA PANDEMI COVID-19



Belanja daerah untuk Fungsi perlindungan sosial yang berkaitan dengan penanganan dampak sosial di masa pandemi masih sangat kecil, secara rata-rata dari seluruh daerah di Riau hanya mencapai 1,1% dari total belanja daerah.

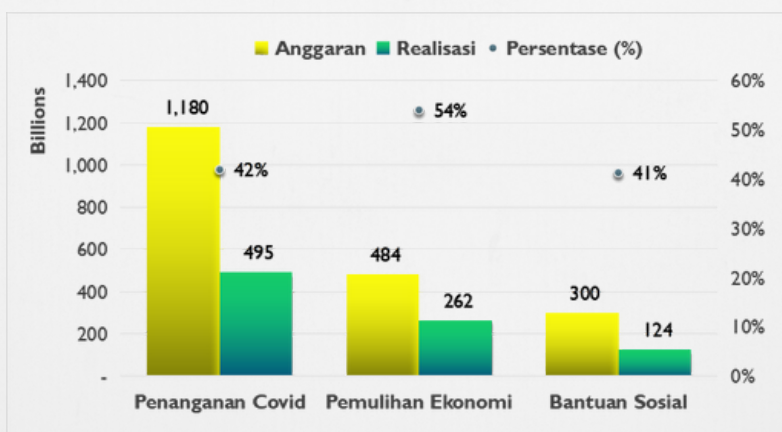
Provinsi Riau hanya 1,2%. Daerah tertinggi yaitu Kab. Inhu 3% dan pelalawan 2,4%, daerah lainnya rata-rata dibawah 2%, bahkan Kab. Inhil, Kuansing, Rohul dan Dumai antara 0,1%-0,5% dari total belanja daerah.

REALISASI APBD SE- RIAU SAMPAI 16 DESEMBER 2021



Kinerja Keuangan daerah pada tahun 2021 berdasarkan realisasi sampai 16 Desember 2021, secara rata-rata baru mencapai 72%, dari angka ini dapat diproyeksikan hingga akhir tahun belanja daerah tidak akan terserap secara maksimal. Daerah terendah serapan APBD tahun 2021 adalah Kab. Bengkalis sebesar 59%, Kuansing 63% dan Pelalawan 69%. Daerah lainnya termasuk Provinsi Riau dengan serapan APBD diatas 70%, Kab. Rohil dengan realisasi tertinggi sudah mencapai 82%. Rendahnya serapan APBD menunjukkan tidak terlaksananya sejumlah program prioritas termasuk untuk penanganan covid-19.

TOTAL ALOKASI & REALISASI ANGGARAN PENANGANAN COVID & PROGRAM PEN DAERAH PROVINSI RIAU & 12 KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021



- Total belanja penanganan Covid dan program PEN Daerah se-Riau mencapai Rp. 1,9 Triliun
- Realisasi sampai per 27 November 2021 baru mencapai 45%, atau sebesar Rp. 880 Milyar.
- Realisasi untuk penanganan Covid-19 sebesar 42%, pemulihan ekonomi 54% dan Bantuan Sosial 41%.

Ket:

1. Realisasi Anggaran Provinsi sampai 23 Desember 2021
2. Realisasi Anggaran Kab/Kota sampai 27 November 2021

KESIMPULAN

- Kesehatan Fiskal Daerah secara umum dalam dua tahun dari 2019-2020 terjadi peningkatan kinerja, namun daerah yang dalam kategori sangat baik/sehat hanya dua daerah yaitu Bengkalis dan Meranti, bahkan masih terdapat daerah yang kurang baik dalam pengelolaan keuangannya. Kedepan pemerintah daerah perlu memperbaiki sejumlah indikator belanja yang menyebabkan kesehatan fiskal daerah menurun, terutama belanja Pegawai terlalu tinggi dan rendahnya rasio Belanja Modal serta ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana transfer.
- Kinerja keuangan daerah tahun 2021, masih belum maksimal dalam merealisasikan belanjanya, rata-rata serapan sampai pertengahan bulan desember 2021 baru mencapai 72%, termasuk belanja untuk penanganan covid dan program PEN Daerah baru terserap sebesar 45%. Selain itu, terdapat ketidakpatuhan dalam mengalokasikan belanja, seperti fungsi kesehatan dan pendidikan masih dibawah angka minimal, serta alokasi belanja masih terfokus program penunjang seperti kebutuhan aparatur dan belanja pegawai, sedangkan belanja fungsi masih sangat minim. Kedepan, dengan kondisi keuangan yang rentan dimasa pandemi maka perlu menata ulang dan merealokasikan anggarannya untuk sektor-sektor prioritas.



Social Media



@FitraProvinsiRiau



Fitra Provinsi Riau



Fitra Riau

Kontak

sekretariat.fitrariau@gmail.com

- Email

www.fitrariau.org

- Website